

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alexander, H. E. *Financing Politics: Money, Elections, and Political Reform*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 1991.
- Birch, Sarah. *Electoral Malpractice*. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Dahlan, Abdul Azis, et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid I. Cet. V. Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Fashri, F. *Penyingkapan Kuasa Simbol: Apropriasi Reflektif Pemikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Juxtapose, 2007.
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Hopkin, J. "Klientelisme dan Politik Partai." Dalam *Handbook of Party Politics*, disunting oleh S. K. Richard dan C. William. London: Sage Publications, 2005.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018.
- Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab*. Cet. II. Bandung: Mizan, 2001.
- Ramadhan, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990.
- Budiarjo, Miriam. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Najib, Mohammad. *Pengawasan Pemilu: Problem dan Tantangan*. Yogyakarta: Bawaslu Provinsi DIY, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi 1. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021.
- Kranenburg, R. *Inleiding in de Vergelijkende Staatsrechtswetenschap*. Den Haag, 1912.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan B. Arief Shidarta. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Buku I. Bandung: Alumni, 2000.
- Rosyada, Dede. *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Sahetapy, J. E. *Teori Kriminologi: Suatu Pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Santoso, Topo, dan Ida Budiati. *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Usman, Husaini, dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Widjaya, A. W. *Demokrasi dan Aktualisasi Pancasila*. Bandung: Alumni, 1984.

B. Jurnal Ilmiah

- Aminuddin, Intan Kumalasari. "Politik Uang Larangan dalam Islam dan Pencegahan pada Pesta Pemilu 2024." *Jurnal Dharmawangsa* 18:3 (2024).
- Amran, Ali. "Stratifikasi Sosial Masyarakat dan Pengaruhnya terhadap Pembinaan Masyarakat Islam." *Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam* 8:1 (2014).
- Ardianto, Hendra Try. "Uang dan Partai Politik: Urgensi Mengatur Keuangan Parpol dan Kandidat dalam Kompetisi Elektoral." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4:1 (2019).
- Azis, A. S. Susiadi. "Ijma' dan Isu Kontemporer." *ASAS* 6:2 (2014).
- Candra, Fadhlil Ade, dan Fadhilatu Jahra Sinaga. "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Edu Society* 1:1 (2021).
- Doly. "Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pengendara Kendaraan Bermotor pada Saat Mudik Lebaran." *INFO Singkat XI*, no. 11 (2019).
- Harris, YP Sibuea. "Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol." *Negara Hukum* 7, no. 1 (2016).
- Islamy, Athoillah Husaini. "Harmonization of Religion and State: Mainstreaming the Values of Religious Moderation in Indonesian Da'wah Orientation." *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 7, no. 1 (2022).
- Kadriyah, Iti Maryamah. "Ijma dalam Ijtima': Gerakan Politik dan Dakwah: Studi Kontekstualisasi Amar Ma'ruf Nahi Munkar." *Ad-Da'wah* 22, no. 1 (2024).
- Delmana, L. P., A. Zetra, dan H. Koeswara. "Problematika dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia." *Electoral Governance* 2 (2020).
- Riadi, M. Erfan. "Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Ulumuddin* 6, no. 2 (2016).
- Begouvic, M. Eza Helyatha. "Money Politik pada Kepemiluan di Indonesia." *Sol Justicia* 4, no. 2 (2021).
- Khoirul, Moh., dan Muchlisin Umam. "Kyai Pesantren dan Politik Uang dalam Pilkada Indonesia." *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 5, no. 2 (2022): 71–81.
- Yusuf DM, Mohd., Andry Kusuma Putra, Revi Yanti Hasibuan, dan Selvin Delpian Giawa. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat." *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Politik* 5, no. 4 (2025): 2869–2870.
- As'ad, Muhammad. "Analisis Sejarah Efektivitas Fatwa MUI." *Tafaqquh* 11, no. 1 (2023): 1–26.
- Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum sebagai Sarana Alat untuk Merekayasa Masyarakat." *Palar Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): 73–94.
- Ichwan, Nur. "Ulama, State and Politics: MUI after Suharto." *Islamic Law and Society* 12, no. 1 (2005): 45–72.

- Fadhlurrahman, R. “Faktor Penyebab Terjadinya Politik Uang dalam Kampanye.” *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional* 3, no. 1 (2024): 20–27.
- Rato, Dominikus. “Realisme Hukum: Peradilan Adat dalam Perspektif Keadilan Sosial.” *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 2 (2021): 285.
- Hidayah, Rizky Nur. “Politik Uang dalam Pemilu Ditinjau dari Perspektif Yuridis-Sosiologis.” *Lex Renaissance* 7, no. 2 (2022).
- Satria, Hariman. “Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia.” *Jurnal Antikorupsi Integritas* 5, no. 1 (2021).
- Supardin. “Kedudukan Lembaga Fatwa dalam Fikih Kontemporer.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2018).
- Sutrisno, Cucu. “Partisipasi Warga Negara dalam Pilkada.” *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2017).
- Veronica, Ayu, Kabib Nawawi, dan Erwin. “Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyelundupan Baby Lobster.” *PAMPAS Law Journal of Criminal Law* 1, no. 3 (2020).
- Winters, Jeffrey A. “Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots.” *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 52, no. 3 (2016).

C. Skripsi, tesis, dan disertasi

- Bratton, Michael, dan Mwangi Kimenyi. “Pemungutan Suara di Kenya.” Makalah Seminar Politik Afrika, Nairobi, 2008.
- Islamy, Athoillah. “Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid.” Disertasi Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.
- Randi, Yusup. “Perspektif Hukum Islam tentang Politik Uang: Kajian atas Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI MUI No. 4/MUNAS VI/MUI/2000.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Rohani. “Praktik Money Politics terhadap Partisipasi Warga Kota Cirebon dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2019.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2023.
- Tuzuhriyah, Lailiya. “Ulama dan Politik: Analisis Peran Politik Ulama Pesantren Berbasis NU Era Reformasi.” 2021.

D. Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

E. Fatwa Majelis Ulama Indonesia:

Majelis Ulama Indonesia. 15 Tahun Majelis Ulama Indonesia. Jakarta. Sekretariat Majelis Ulama Indonesia. 1990.

Majelis Ulama Indonesia. *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI Tahun 2018*.

Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI MUI No. 4/MUNAS VI/MUI/2000 tentang Politik Uang.

F. Sumber Daring:

Asep Kurnia, "Asal Usul Pilang Cirebon, Singkatan dari Pedati Ilang, Pernah Miliki Jalur Kereta Api," *Radarcirebon*, 16 April 2024,

<https://radarcirebon.disway.id/sejarah/read/178258/asal-usul-pilang-cirebon-singkatan-dari-pedati-ilang-pernah-miliki-jalur-kereta-api>,

(diakses pada tanggal 13 Desember 2025).

Crisna Matahari, Fanny. "Miris, Masyarakat Makin Terbuka terhadap Politik Uang di Pilkada, Rela Ubah Pilihan." *Kabar Cirebon*, 18 Februari 2025.

https://www.google.com/search?q=Crisna+Matahari%2C+Fanny.+%E2%80%9CMiris%2C+Masyarakat+Makin+Terbuka+terhadap+Politik+Uang+di+Pilkada%2C+Rela+Ubah+Pilihan.%E2%80%9D&oq=Crisna+Matahari%2C+Fanny.+%E2%80%9CMiris%2C+Masyarakat+Makin+Terbuka+terhadap+Politik+Uang+di+Pilkada%2C+Rela+Ubah+Pilihan.%E2%80%9D&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBBzkwM2owajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Diakses 4 Juli 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Diakses 22 Oktober 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

Kementerian Agama RI. "Menag: Ijtima Ulama, Tradisi Indonesia Merawat Keberagaman." Diakses 23 Februari 2024. <https://kemenag.go.id>

Lutfy Mairizal Putra. "Bawaslu Temukan 600 Dugaan Politik Uang Pada Pilkada 2017." Diakses 4 Juli 2025.

<http://nasional.kompas.com/read/2017/02/14/19334401/bawaslu.temukan.600.dugaan.politik.uang.pada.pilkada.2017>

Pemerintah Desa Pilangsari, “Website Resmi Desa Pilangsari Kabupaten Cirebon”, <https://pilangsari.desa.cirebonkab.go.id/> (diakses 13 Desember 2025).

Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol. Diakses 5 April 2022. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/5c38de8a798f624eab38b1fe6f7e97ff.pdf

G. Wawancara Pribadi:

Aulia Afifah, warga Desa Pilangsari, wawancara pada Hari Jumat, 14 Desember 2025.

Doni Harun, warga Desa Pilangsari, wawancara pada Hari Jumat, 14 Desember 2025.

Giri, Panitia Pemungutan Suara Desa Pilangsari, keterangan langsung data pemilih tetap Desa Pilangsari, 15 November 2025.

Nengsiya, warga Desa Pilangsari, wawancara pada Hari Kamis, 20 November 2025.

Nuriah, warga Desa Pilangsari, wawancara pada Hari Kamis, 30 Oktober 2025.

Putri Mardiyanti, warga Desa Pilangsari, wawancara pada Hari Rabu, 5 November 2025.

Rudi Hartono, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Cirebon, wawancara pada Hari Jum'at 23 November 2025.

Sobirin Akmil, Ketua Majelis Ulama Desa Pilangsari, wawancara pada Hari Kamis, 30 Oktober 2025.

Ubaidillah, akademisi hukum, wawancara pada Hari Kamis, 6 November 2025.

Ujang Kusumah Atmawijaya, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Cirebon, wawancara pada Hari Jumat 7 November 2025.